

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1 Usaha, Mikro, Kecil & Menengah (UMKM)

Dalam UU No 20 Tahun 2008 pengertian “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki tujuan untuk menumbuhkan serta mengembangkan usahanya guna membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Berikut ini merupakan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut UU Nomor 20 Tahun 2008.

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kriteria yang berbeda berdasarkan aset dan omsetnya. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kriteria UMKM berdasarkan Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp300 juta
Usaha Kecil	>Rp50 juta - Rp500 juta	>Rp300 juta - Rp2,5 Milyar
Usaha Menengah	>Rp500 juta - Rp10 Milyar	>Rp2,5 Milyar - Rp50 Milyar

Sumber: Profil UMKM (2015)

2.1.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil atau kinerja dari pihak pengelola perusahaan dalam usaha pertanggungjawaban penggunaan sumberdaya dan sumber dana yang dipercayakan kepada pihak pengelola (Satria, 2016). Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut dalam suatu periode akuntansi.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan atau aktivitas perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan antara lain:

1. Pihak manajemen perusahaan.

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2. Pemilik perusahaan.

Fungsi laporan keuangan yaitu untuk memberi informasi terkait keadaan perusahaan yang dilihat dari sisi keuangan.

3. Investor dan pemegang saham.

Investor biasanya mengambil keputusan melalui laporan keuangan.

4. Kreditur.

Kreditur atau pemberi pinjaman biasanya melihat kesehatan perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan untuk memutuskan perusahaan layak atau tidak untuk diberikan kredit atau pinjaman.

5. Pemerintah.

Pemerintah memiliki kepentingan untuk memungut pajak berdasarkan laporan keuangan yang ada.

6. Karyawan.

Karyawan memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan tempat mereka bekerja.

Laporan keuangan mempunyai syarat-syarat yang menjadi ciri khas dalam membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan dalam hal pengambilan keputusan bernilai ekonomis. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Dapat dipahami, artinya yaitu dalam penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan siklus akuntansi yang jelas agar pihak yang membutuhkan informasi keuangan dapat memahami isi dari laporan keuangan dengan jelas.
2. Relevan, artinya yaitu laporan keuangan harus menggambarkan informasi penting yang sesuai dengan kegiatan perusahaan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, atau pun mengoreksi hasil evaluasi pada masa lalu.

3. Keandalan, laporan keuangan yang disusun harus memiliki keandalan, yakni sesuai dengan komponen laporan keuangan dengan ukuran dan daya uji kebenaran. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, serta dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan.
4. Dapat dibandingkan, laporan keuangan yang dibuat harus memiliki daya banding atau dapat dibandingkan. Artinya laporan keuangan harus memberikan informasi sebagai pembanding dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
5. Mempunyai daya uji, laporan keuangan yang sudah disusun dengan panduan konsep-konsep dasar akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang telah disahkan, sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain.
6. Netral, laporan keuangan yang disajikan bersifat umum, objektif dan tidak memihak pada kepentingan pemakai tertentu.
7. Tepat waktu, laporan keuangan harus disajikan tepat pada waktunya.
8. Lengkap, laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat diatas dan tidak boleh menyesatkan pembaca.

2.1.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Sujarweni (2017), adapun jenis laporan keuangan yang lengkap antara lain meliputi Neraca, Laporan laba rugi, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca (*Balance Sheet*) yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca juga dapat diartikan sebagai laporan yang menggambarkan

mengenai kekayaan dan kewajiban atau beban suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

2. Laporan laba rugi (*Income Statement*) yaitu laporan mengenai pendapatan, beban, dan laba/rugi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja operasi perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu dan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha dan keefisienan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.
3. Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang menyajikan perubahan modal karena penambahan dan pengurangan dari laba/rugi dan transaksi pemilik.
4. Laporan arus kas yaitu laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu.
5. Catatan atas laporan keuangan merupakan sebuah informasi maupun catatan tambahan yang ditambahkan untuk memberi penjelasan kepada pembaca atas laporan keuangan. Tujuannya yaitu untuk memberikan bantuan penjelasan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan.

2.1.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM)

SAK EMKM merupakan singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah yang dirumuskan oleh sebuah lembaga profesi yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai salah satu bentuk dukungan untuk menyokong perkembangan UMKM di Indonesia. Lambat

laun, ketersediaan SAK umum yang berbasis IFRS dan SAK ETAP mulai dibutuhkan dikarenakan keterbatasan SDM dalam menghasilkan laporan keuangan. Kemudian pada tahun 2016, DSAK IAI mengesahkan SAK EMKM sebagai upaya untuk mendukung kemajuan perekonomian di Indonesia. SAK EMKM efektif mulai tanggal 1 Januari 2018.

SAK EMKM merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha dalam membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Peraturan akuntansi dalam SAK EMKM jauh lebih sederhana daripada SAK ETAP dikarenakan mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis.

“Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut.” (Ikatan Akuntan Indonesia,2016).

Dari sisi teknis, SAK EMKM murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Dalam SAK EMKM disebutkan bahwa UMKM dapat menggunakan SAK EMKM adalah entitas mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya dua tahun berturut-turut. (Sari,2021).

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai kebijakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil & Menengah (SAK EMKM):

1. Konsep & Prinsip Pervasif

Berdasarkan SAK EMKM, tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan laporan posisi keuangan dan kinerja dari entitas tersebut yang dapat menjadi manfaat untuk semua penggunanya dalam hal melakukan pengambilan keputusan ekonomik oleh siapa saja yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus demi memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Adapun pengguna yang dimaksud antara lain seperti kreditor maupun investor.

a. Posisi Keuangan

Informasi mengenai posisi laporan keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu dan juga disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Adapun definisi dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

Aset adalah sumberdaya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh dari entitas. Manfaat ekonomi masa depan suatu aset merupakan potensi yang dimiliki aset tersebut untuk memberikan kontribusi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap arus kas. Arus kas dapat muncul dari penggunaan ataupun pelepasan aset. Aset dapat dikategorikan sebagai aset berwujud (tanah, bangunan, uang, emas, dsb) dan aset tidak berwujud (merek dagang, hak paten, kekayaan intelektual, hak cipta, dsb).

Liabilitas adalah kewajiban entitas yang muncul dari kejadian masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial dari liabilitas yakni bahwa

entitas mempunyai kewajiban saat ini untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu melalui cara tertentu.

Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas yaitu klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi liabilitas.

b. Kinerja

Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi tentang penghasilan dan beban selama periode pelaporan yang disajikan dalam laporan laba rugi. Adapun definisi dari unsur-unsur tersebut, antara lain:

Penghasilan (*income*) merupakan kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan banyak sebutan, misalnya : penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Keuntungan mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan, misalnya: keuntungan dari pelepasan aset.

Beban (*expense*) merupakan penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

c. Pengukuran Unsur-unsur Laporan Keuangan

Pengukuran didefinisikan sebagai proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengakuan unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM yaitu biaya historis. Biaya historis suatu aset merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sedangkan biaya historis suatu liabilitas yaitu jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

d. Asumsi Dasar

1) Dasar Akrua

Dalam dasar akrua, pos-pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing pos-pos tersebut.

2) Kelangsungan Usaha

Entitas mempunyai kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak memiliki kelangsungan usaha.

3) Konsep Entitas Bisnis

Dalam menyusun laporan keuangan, entitas harus menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang

merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas lainnya.

e. Pengakuan Dalam Laporan Keuangan

1) Aset

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonomiknya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset tidak diakui dalam laporan keuangan apabila manfaat ekonomiknya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun telah terjadi pengeluaran. Alternatifnya, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

2) Liabilitas

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumberdaya yang mengandung manfaat ekonomik dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

3) Penghasilan

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4) Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Agnisa Nurul Qamar (2020)	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus UMKM Penguin <i>Laundry And Dry Cleaning</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan UMKM Penguin <i>Laundry And Dry Cleaning</i> masih belum sesuai dengan SAK EMKM dikarenakan pemilik hanya menginput pengeluaran dan pendapatan di dalam aplikasi <i>smartlink</i> . Laporan Laba Rugi menunjukkan bahwa laba perusahaan tahun 2019 sebesar Rp27.411.420. Laporan Posisi Keuangan menunjukkan aset perusahaan tahun 2019 sejumlah Rp804.779.780. Penguin <i>Laundry And Dry Cleaning</i> tidak memiliki kewajiban yang harus dibayarkannya. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan-penjelasan mulai kebijakan akuntansi entitas, Laporan umum entitas dan penjelasan setiap rekening yang ada di dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi.
2	Atika Sari (2021)	Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK-EMKM) Pada Usaha Mikro Kecil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM Berkah <i>Laundry</i> berdasarkan SAK-EMKM memiliki tiga komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan dengan jumlah aset

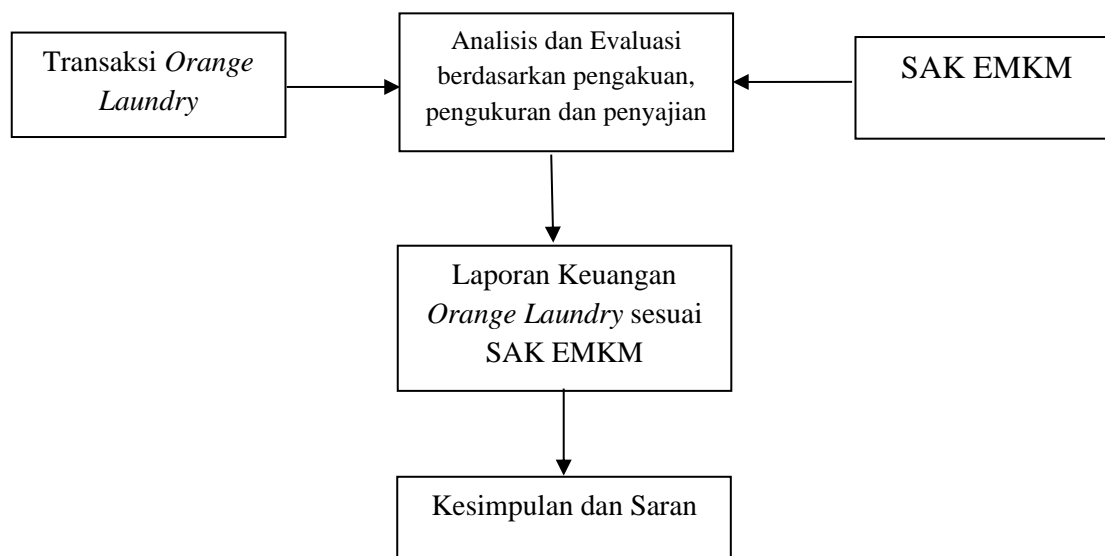
		Menengah (Umk) Berkah Laundry	Rp45.222.375 serta jumlah ekuitas dan liabilitas Rp45.222.375, laporan laba rugi dengan jumlah laba Rp7.602.375 dan catatan atas laporan keuangan.
3	Marwati (2018)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Penyusunan Laporan Keuangan UD. Sakiah Jaya	Hasil penelitian menunjukkan UD. Sakiah Jaya Tidak menerapkan SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangannya, karena pemilik UD. Sakiah Jaya kurang memahami SAK EMKM tentang penyajian laporan keuangan. Pemilik menganggap pencatatan yang dilakukan sudah jelas dan efektif. Adapun kendala-kendala UD. Sakiah Jaya dalam menerapkan SAK EMKM, sebagai berikut : kurangnya pengetahuan pemilik UD. Sakiah Jaya tentang SAK EMKM, belum adanya tenaga akuntansi yang profesional pada UD. Sakiah Jaya, dan pemilik kurang memahami pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.
4	Putu Rika Yuliarni, Nyoman Trisna Herawati, Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2018)	Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Dan Dampaknya Pada UD. Pak Gex Aluminium Di Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pencatatan keuangan yang dilakukan pada UD. Pak Gex Aluminium masih sangat sederhana, (2) Dengan penerapan SAK EMKM pada UD. Pak Gex Aluminium diketahui Laporan posisi keuangan dengan jumlah aset Rp643.601.774 dan jumlah utang dan modal Rp.643.601.774, Laporan laba rugi dengan jumlah laba Rp77.412.818, dan Catatan atas laporan keuangan, (3) Dampak yang dirasakan dari penerapan SAK EMKM pada UD. Pak Gex Aluminium adalah membantu pemilik usaha untuk mengambil keputusan bisnis agar usahanya

			tetap berjalan dengan baik kedepannya.
5	Ari Nuvitasari, Norita Citra, Nina Martiana (2019)	Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh UD. Karya Tangi Banyuwangi masih sangat sederhana dan tidak sesuai dengan SAK EMKM karena pemilik UMKM tidak memahami dan memahami standar laporan keuangan khusus untuk UMKM, setelah menerapkan laporan keuangan UD. Karya Tangi Banyuwangi berdasarkan SAK EMKM secara keseluruhan, disiapkan dan disajikan dengan jumlah yang sama. Penerapan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari tiga komponen, yaitu laporan posisi keuangan, beberapa statistik dan catatan laporan keuangan.
6	Noval Roynaldo Sinaga (2021)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Pada Penyusunan Laporan Keuangan di Saf Handicraft.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Saf Handicraft telah menyusun catatan keuangan, namun belum sesuai dengan SAK EMKM.
7	Lastri Arlenta Sihite (2020)	Penerapan SAK EMKM Pada UMKM <i>Custom</i> Kekinian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan UMKM <i>Custom</i> Kekinian telah disusun dan dicatat menggunakan <i>software</i> akuntansi, namun belum sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK EMKM.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teori penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka UMKM sebagai salah satu usaha yang berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional sangat perlu untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Sehingga jika laporan keuangan sesuai dengan standar EMKM akan benar-benar menjadi salah satu solusi bagi permasalahan perekonomian Indonesia.

Kerangka konseptual ini akan menjelaskan bagaimana peneliti menganalisis laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak UMKM *Orange Laundry*. Kemudian merancang laporan keuangan tersebut dengan berdasarkan SAK EMKM yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dan kemudian memberikan rekomendasi untuk keberlangsungan usaha tersebut.



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir